

**EVALUASI PENJATUHAN SANKSI PEMBATALAN CALON
YANG MENAKIBATKAN PELAKSANAAN PILKADA CALON
TUNGGAL (STUDI KASUS PILKADA KOTA MAKASSAR
TAHUN 2018)**

Oleh:

Muhammad Khatami Ali Jusfa,¹ Dr. Richo Andi Wibowo,
S.H., LL.M.²

INTISARI

Tujuan penelitian ini ada dua. Pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan sanksi pembatalan calon pada pilkada yang kondisinya diikuti oleh 2 pasangan calon sudah tepat atau tidak. Kedua, untuk mengetahui cara mendesain sanksi alternatif pengganti sanksi pembatalan calon yang diberlakukan khusus dalam keadaan pilkada hanya diikuti oleh 2 pasangan calon.

Metode penelitian ini adalah penelitian normatif. Menggunakan jenis dan sumber data sekunder berupa studi kepustakaan yakni dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Lokasi penelitian berada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pengambilan data sekunder dilakukan dengan melaksanakan studi kepustakaan, kemudian data dari penelitian ini dianalisis menggunakan metode kualitatif yang nantinya menghasilkan data deskriptif.

Hasil penelitian didapatkan berdasarkan rumusan masalah yang ada. Pertama, pelaksanaan sanksi pembatalan calon pada Pilkada kota Makassar terbukti tidak tepat ditinjau dari aspek pelaksanaan prosedur hukum dan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan sanksi pembatalan calon. Kedua, rancangan sanksi alternatif harus bisa membantu terjaminnya tujuan dari pelaksanaan Pilkada dan apabila hendak diatur dalam undang-undang harus sesuai mengikuti asas-asas hukum dalam pembentukan undang-undang, kemudian untuk opsi sanksi alternatif, peneliti menyarankan menggunakan sanksi denda administratif dan pengumuman di media massa.

Kata kunci: Pilkada, Sanksi Pembatalan Calon, Sanksi Alternatif

¹ Mahasiswa Program Studi Sarjana, Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

² Dosen Departemen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

**EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF
CANCELLATION CANDIDATES SANCTIONS THAT RESULT IN
THE IMPLEMENTATION OF SINGLE CANDIDATE ELECTIONS
(CASE STUDY OF MAKASSAR CITY ELECTION 2018)**

By:

Muhammad Khatami Ali Jusfa,³ Dr. Richo Andi Wibowo,
S.H., LL.M.⁴

ABSTRACT

There are two purposes of this research. First, to find out and analyze the implementation of sanctions for canceling candidates in the regional elections where the conditions are followed by 2 pairs of candidates, whether they are correct or not. Second, to find out how to design an alternative sanction to replace the sanction of cancellation of a candidate which is specifically applied in the case of an election that is only followed by 2 pairs of candidates

This research method is normative research. Using secondary data types and sources in the form of library research, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The research location is in Makassar City, South Sulawesi. Secondary data retrieval is done by carrying out a literature study, then the data from this research is analyzed using qualitative methods which will produce descriptive data.

The results of the study were obtained based on the formulation of the existing problems. First, the implementation of sanctions for canceling candidates in the Makassar City Election was proven to be inappropriate in terms of the implementation of legal procedures and the impact of the implementation of sanctions for canceling candidates. Second, the alternative sanction design must be able to help ensure the purpose of the implementation of the election and if it is to be regulated in law, it must comply with legal principles in the legal drafting, then for alternative sanctions options, the researcher suggests using administrative fines and announcements in the media.

Keywords: Election, Cancellation Candidates Sanctions, Alternative Sanctions

³ Undergraduate Degree Student of Departement Administrative Law, Faculty of Law Gadjah Mada University

⁴ Lecture of Departement of Administrative Law, Faculty of Law Gadjah Mada University